

**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK  
MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI  
DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Laily Rahmawati Zahida**

**NIM 401190271**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

Zahida, Laily Rahmawati. Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Dalam Perspektif Islam. Skripsi 2023. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bismis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Lutfi Prasetyo, S. Ag., M.E.I.

**Kata Kunci:** Implementasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan Ekonomi  
Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai suatu bentuk mengatasi krisis ekonomi dikalangan masyarakat miskin untuk menangani akibat dari dampak Covid-19, yang terjadi pada tahun 2020, program ini diberikan untuk kalangan masyarakat miskin, salah satunya adalah Program Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa atau biasa disebut dengan BLT-DD, Program BLT ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemenuhan kebutuhan pokok, dan mampu mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga. Peneliti ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Dalam Perspektif Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dari perangkat desa, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan warga sekitar. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat Desa Karangpatihan pada tahun 2023 yaitu 34 KK. Kontribusi dana BLT sangat membantu terhadap ketahanan ekonomi keluarga yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan. Keluarga di desa Karangpatihan yang mendapatkan dana BLT ini lebih banyak digunakan sebagai tambahan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jerangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi denganatas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1.	Laily Rahmawati Zahida	401190271	Ekonomi Syariah	Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya telah disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 03 Mei 2023

Mengetahui,

Menyetujui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M. E. I  
NIP. 197801122006041002

Dr. Luhur Prasetyo, M. E. I  
NIP. 197801122006041002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Islam Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Dalam Perspektif Islam  
Nama : Laily Rahmawati Zahida  
NIM : 401190271  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :  
Dr. Hj. Ely Musykuroh, M.SI  
NIP. 197202111999032003

()

Penguji I :  
Unun Roudlotul Janah, M. Ag  
NIP. 197507162005012004

()

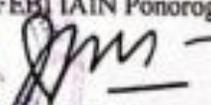
Penguji II :  
Dr. Luhur Prasetyo, M. E. I  
NIP. 197801122006041002

()

Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo

  
Dr. H. Ikhfal Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031002



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laily Rahmawati Zahida  
NIM : 401190271  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/ Tesis : Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Dalam Perspektif Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023  
Penulis

  
Laily Rahmawati Zahida



## KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lally Rahmawati Zahida

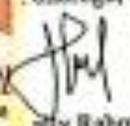
NIM : 401190271

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK  
MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI DESA  
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri, kecuali pada  
bagian tertentu yang harus dilakukan rujukan pada sumbernya.

Ponorogo, 03 Mei 2023  
  
Lally Rahmawati Zahida  
NIM 401190271

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan Corona Virus atau biasa disingkat dengan Covid-19, dimana virus tersebut berasal dari Wuhan, China sampai dengan melanda Indonesia pada awal Bulan Maret 2020. Virus tersebut menyebar di seluruh Negara Indonesia tidak terkecuali adalah Provinsi Jawa Timur khususnya adalah Kabupaten Ponorogo.

Hal tersebut pasti akan mempengaruhi sektor ekonomi Indonesia di mana meningkatkan potensi masyarakat miskin akibat dampak Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) akibat dari Covid-19, tak terkecuali yaitu Desa Karangpatihan Kecamatan Balong. Oleh sebab itu pemerintah juga akan berputar otak agar meminimalisir angka penyebaran Virus Covid-19 dan peningkatan masyarakat miskin di Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan baru tentang pandemi Covid-19 dengan memberikan berbagai program jaminan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan (BLT-DD).

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian

besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, dan perkebunan, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll. Adapun rincian pekerjaan masyarakat desa Karangpatihan Kecamatan Balong sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Pekerjaan Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Lain-lain
1.800 orang	560 orang	340 orang	1.200 orang	1.980 orang

**Tabel 1.2**

Jumlah Penerima BLT

Penduduk Desa Karangpatihan	
Laki-Laki	2.935 Orang
Perempuan	2.952 Orang
Jumlah Penduduk	5.887 Jiwa
Jumlah KK	2.152 KK
Penerima BLT	
Tahun 2021	103 KPM
Tahun 2022	484 KPM
Tahun 2023	34 KPM

Dapat dilihat dari tabel tersebut, dari 2.152 KK terdapat 103 KK yang menerima BLT pada tahun pertama yaitu tahun 2021 dan 484 KK pada tahun kedua yaitu tahun 2022 yang mengalami kenaikan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat dampak covid-19 yang meningkat, dan pada tahun 2023 Jumlah penerima bantuan mengalami penurunan yang sangat

signifikan yaitu hanya 34 KPM.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di desa tersebut dan rentan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19. Dana desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya. Terutama dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan dana desa. Dana desa dapat dialokasikan menjadi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diperuntukkan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan seperti pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>

Selain itu kebijakan BLT dana desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Imigrasi (PERMENDES PDTT) Nomor 6 tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

---

<sup>1</sup> Arumdani Nafida, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo," *Mei 2021* Vol. 2 No. 5 : 875.

Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 merupakan dasar yuridis dan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat. Tepat maksudnya adalah tepat sasaran penerima, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya berlaku jujur dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kami) apabila menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S An-Nisa' : 58).<sup>3</sup>

Manusia di muka bumi haruslah saling tolong-menolong dalam kondisi apapun. Ukhuwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang

<sup>2</sup> Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, Dan Novie Anders Palar, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa," No. 108.79.

<sup>3</sup> "Al-Quran dan Terjemahannya ( Bandung : CV Diponegoro, 2005), 150.

saling tolong-menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”. Islam merupakan agama yang menanam kepedulian dalam diri pemeluknya. Dan Allah SWT mendorong manusia untuk saling-tolong sesamanya. Allah SWT berfirman :<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Maidah (5) : 2)

PONOROGO

Pada ayat ini manusia diperintahkan untuk tolong-menolong. Tolong-

<sup>4</sup> “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 3 Mei 2023, <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.

menolong merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang sangat membutuhkan. Karena sesungguhnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah disalurkan ke masyarakat desa melalui pemerintah desa dan dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwah. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya program bantuan yang optimal. Dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun*, pemerintah pusat, daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Besaran nilai BLT-Dana Desa yang diterima setiap keluarga adalah Rp. 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2023 setiap bulannya yang akan disalurkan selama 12 bulan. Jumlah penerima BLT-DD di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sebanyak 34 kepala keluarga atau

KPM.<sup>5</sup> Calon penerima BLT-DD ialah warga miskin yang kehilangan pekerjaan, atau memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit, serta warga miskin yang terdampak ekonomi karena kehilangan pekerjaannya. Selain itu juga merupakan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain, seperti Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lainnya. Pendataan calon penerima BLT Dana Desa di pertimbangkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Penetapan data bagi keluarga miskin di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT<sup>6</sup>.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di desa, tak terkecuali adalah Desa Karangpatihan. Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, salah satunya yakni tentang program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT DD. Adapun besaran yang dianggarkan paling

---

<sup>5</sup> Eko Mulyadi, Wawancara, 3 April 2023.

<sup>6</sup> Fika Nurahmawati, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak," 2020 Vol. 4, no. 2:166, <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>.

sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari anggaran Dana Desa, dengan kriteria KPM BLT DD sesuai aturan yakni, keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan yaitu Desa Karangpatihan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 yaitu rumah tangga yang masuk dalam kategori 1-10% dan merupakan tingkat paling rendah kesejahteraan secara nasional, data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Jadi bila dalam pendataan di desa itu tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, desa dapat menetapkan calon keluarga penerima dari keluarga dari desil 2 sampai dengan desil 4 dan bila semuanya juga tidak ada. Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriterianya. Lanjutnya, Untuk kriteria penerimaan BLT Dana Desa yakni pertama kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.<sup>7</sup>

Sejauh ini pencairan dana Bantuan Langsung Tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti tidak tepatnya sasaran penyaluran

---

<sup>7</sup> “Terkait Besaran dan Kriteria Penerima BLT-DD Tahun 2023, Ini Penjelasan Kepala DPMD Banyuasin | BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN,” 3 April 2023, <https://sumsel.bpk.go.id/2023/02/20/terkait-besaran-dan-kriteria-penerima-blt-dd-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-dpmd-banyuasin/>.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Diantaranya adalah kurang tepatnya sasaran penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak mendapatkan bantuan. Dalam teori Aristoteles mengemukakan mengenai Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.<sup>8</sup> Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Demikian halnya dengan pemerataan BLT yang menjadi program pemerintah selama masa pandemi ini. Tujuan BLT pada dasarnya untuk meringankan perekonomian masyarakat akibat sebagian mata pencaharian mereka menjadi lumpuh, terutama keluarga dengan ekonomi menengah kebawah yang nantinya bisa membantu mempertahankan ekonomi keluarga.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Dalam Perspektif Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk ketahanan ekonomi keluarga di Desa Karangpatihan, Kecamatan

---

<sup>8</sup> Nining Pasila, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Pada Tahun 2021 Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba,” *Skripsi, Muhammadiyah Makasar*, 2022, 06.

Balong?

2. Bagaimana dampak Bantuan Sosial Tunai (BLT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah masalah selesai dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk ketahanan ekonomi keluarga di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong?
2. Untuk menganalisis dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga di Desa karangpatihan Kecamatan Balong ?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah pengetahuan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong.
- b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang efektivitas pengelolaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap masyarakat miskin di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Negara: sebagai perbaikan proses pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan SDM yang akan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. Dan sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengambilan keputusan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Ponorogo.

- b. Bagi Akademik: penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan mampu menyajikan informasi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- c. Bagi Peneliti: menjadi pegangan dan menjadi bahan kajian untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang disusun oleh Diana Nabillah Putri tahun 2021 Universitas Islam Negeri Raden Saleh Lampung dengan judul “Analisis Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung”. Penelitian Diana Nabillah Putri menggunakan metode kualitatif diskriptif. Hasil dari penelitian yaitu implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam ketahanan ekonomi keluarga di desa Jati Mulyo belum cukup menyeluruh dapat mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masyarakat. Dari hasil observasi peneliti diperoleh masih banyak nya masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Dimana untuk memulai usaha demi

mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga masih banyak yang tidak melakukannya, seperti membuka usaha. Sedangkan berdasarkan pandangan ekonomi islam implementasi dana bantuan langsung tunai (blt) telah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi islam *sidiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), dan *amanah* (dapat dipercaya)<sup>9</sup>. Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama memfokuskan pada masalah tentang implementasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam persepektif ekonomi islam dan perbedaan dalam lokasi penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Imron Rosidi tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid 19”. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun

---

<sup>9</sup> Diana Nabillah Putri, “(Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan),” *UIN Raden Saleh Lampung*, 2022.

yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa. Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama fokus dalam membahas Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan kedua peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan berada pada lokasi penelitian dan peneliti terdahulu lebih membahas kesejahteraan, sedang peneliti ini lebih membahas tentang ketahanan ekonomi keluarga.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh dari Yola Aprilia pada tahun 2021 Institut Agama Islam Raden Intan dengan judul “ Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Kesejahteraan masyarakat merupakan tugas pertama dan utama bagi pemerintah negara, sesuai Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Pada awal tahun 2020 pandemi *Covid-19* melanda dunia oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus. Karena itu pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus. Karena itu pemerintah memberikan suatu kebijakan mengenai bantuan sosial untuk masyarakat miskin maupun terdampak *Covid-19*, termasuk yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

---

<sup>10</sup> Imron Rosidi, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwagi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid-19 K,” *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022, 89.

(BLT-DD). Begitupun kasus tidak tepat sasaran nya Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Teba Jawa. Hasil penelitian menunjukkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Teba Jawa belum terlaksana secara efektif terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak *Covid-19* dari perspektif ekonomi islam. berlandaskan alasan dalam pemanfaatnya belum maksimal yang mana masyarakat penerima hanya menerima secara terus-menerus tanpa adanya pengembangan atau berwiraswasta sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>11</sup>

Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama fokus dibidang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dan keduanya menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis diskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu fokus pada Kesejahteraan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sedangkan peneliti ini berfokus pada Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Dessy Laras Wati pada tahun 2021 Institut Agama Islam Sultan Syarif Kasim dengan judul “ Peranan Bantuan Langsung Tunai Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kanigirian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Metode dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Yolla Aprilia, “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran),” *UIN Raden Intan Lampung*, 2021, 99.

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, dengan pengumpulan data wawancara dan observasi. Desa Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 kota merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi Covid-19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota-kota besar. Karena pandemi Covid-19 dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian menurun. Dan banyaknya sektor mulai dari sektor perekonomian, rumah tangga, UMKM juga terdampak akibat Covid-19. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekripsi ini di dapat hasil yaitu Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada perekonomian Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, di Kabupaten 50 di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Nagari simalanggang sudah di lakukan dengan baik oleh pemerintah desa, namun bantuan ini memang tidak secara langsung berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di masa pandemic covid-19, namun program ini membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersifat jangka pendek, yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sembako<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Dessy Laras Wati, "Program S1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1442 H/2021 M," *Uin Sultan Syarif Kasim*, 2021, 82.

Persamaan skripsi dengan peneliti ini adalah sama-sama fokus dibidang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dan keduanya menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu memfokuskan pada Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 sedangkan peneliti ini berfokus pada Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Insiya Meilin Sururoh tahun 2021 Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Pada Maret 2020 pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga berdampak pada perekonomian di dunia khususnya perekonomian di Indonesia termasuk di Desa Pancuran Gading dan pemerintah memberi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi dana BLT pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan

datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan data model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan data atau verifikasi. Uji pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat Desa Pancuran Gading pada tahap pertama yaitu 93 KK dan tahap kedua sampai tahap keempat mencapai 111 KK. Kontribusi dana BLT pada masa pandemi covid-19 sangat membantu terhadap ketahanan ekonomi keluarga yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan. Keluarga di Desa Pancuran Gading yang mendapatkan dana BLT ini lebih banyak digunakan sebagai tambahan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk tambahan modal usaha serta untuk pembiayaan pendidikan anak.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi dengan peneliti ini adalah sama-sama fokus dibidang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ketahanan ekonomi keluarga, keduanya menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis diskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu memfokuskan pada

---

<sup>13</sup> Insiya Meilin Sururoh, "Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto," *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2021, 121.

Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian.

Sekripsi yang disusun oleh Nur Fitri Tsania tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng”. Implementasi program bantuan langsung tunai di Desa Laringgi yaitu mengimplementasikan program bantuan langsung tunai desa Laringgi dari pengimplementasian itu desa Laringgi bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Laringgi. Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Laringgi kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (Lima) orang yang ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Laringgi kabupaten Soppeng, terdiri dari empat aspek yaitu (1) Komunikasi, terbagi menjadi tiga yaitu pertama transmisi/penyalur komunikasi pemerintah desa sudah efektif dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), yang kedua kejelasan sosialisasinya sudah merata sedangkan yang ketiga konsistensi sudah baik. (2). Disposisi/sikap cukup baik masyarakat yang mendapatkan bantuan sangat senang di desa Laringgi. (3) Sumberdaya terdiri

dari Sumber daya manusia yang sudah cukup baik dalam program bantaun langsung tunai, sarana dan prasaranya sudah memadai untuk penyaluran BLT.

(4) Struktur Birokrasi, terbagi atas dua yaitu SOP dan Fragmentasi keduanya sudah cukup baik dalam program penyaluran bantuan langsung tunai di desa Laringgi.<sup>14</sup>

Persamaan Peneliti dengan penulis yaitu sama-sama fokus dalam membahas Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan kedua peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan berada pada lokasi penelitian dan peneliti terdahulu lebih membahas Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin, sedang peneliti ini lebih membahas Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga.

Sekripsi yang disusun oleh Bahhanuddin pada tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”. Penelitian ini dilakukan di desa Tua Nanga kecamatan poto tano Sumbawa barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tua Nanga kecamatan poto tano kabupaten Sumbawa Barat. Adapun aspek yang

---

<sup>14</sup> Nur Fitri Tsania, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng,” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022, 88.

diteliti secara garis besar meliputi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) dan faktor pendukung dan penghambat implementasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan lansung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioftimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.<sup>15</sup> Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama membahas implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian.

Sekripsi yang disusun oleh Meilana Aula pada tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masyarakat Miskin Yang

---

<sup>15</sup> Baharuddin, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 202,” *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2020, 69.

Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur” . Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah Covid-19 yaitu dengan cara mewujudkan program-program bantuan sosial salah satunya Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Melalui program tersebut pemerintah berharap kedepannya bisa membantu meringankan beban masyarakat miskin khususnya yang terdampak Pandemi Covid-19 di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang berisi metode untuk mengumpulkan data dalam bentuk tertulis atau lisan dari individu ataupun kelompok yang diamati dan bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan aktivitas sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ini sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan kebijakan sudah tercapai, tetapi tidak maksimal dikarenakan adanya beberapa indikator dari dimensi-dimensi pelaksanaan kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang kurang dilaksanakan dengan baik seperti data yang tidak valid atau tidak sesuai dengan

fakta dilapangan sehingga dalam hal tersebut terjadi ketidak tepatan sasaran.<sup>16</sup> Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama membahas implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas implementasi BLT terhadap masyarakat miskin, sedangkan penulis membahas implementasi BLT untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian.

Sekripsi yang disusun oleh Andi Rahmat Nizar Hidayat pada tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian.

---

<sup>16</sup> Meilana Aulia, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,” *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022, 55.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah daerah sebagai regulator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tappale Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkan Surat Keterangan pembentukan Relawan Desa COVID-19 (2) Peran pemerintah daerah sebagai dinamisor di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (3) Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.(4) dan aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone meliputi sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program dan koordinasi dalam pelaksanaan.<sup>17</sup> Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa

---

<sup>17</sup> Andi Rahmat Nizar Hidayat, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone,” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2021, 157.

penelitian ini sama-sama membahas implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas Penerapan BLT Sebagai Upaya Penangan Covid 19, sedangkan penulis membahas implementasi BLT untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga selain itu perbedaan juga pada lokasi penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa penjelasan melalui kalimat atau kata-kata, maupun berupa gambar bukan penjelasan dengan menggunakan statistik angka.

Sifat penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan serta menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dalam Persepektif Ekonomi Islam. Data atau informasi yang diperoleh didiskripsikan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian nantinya akan ditarik kesimpulan.

## 2. Penelitian Lapangan

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## 3. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan yang dikumpulkan dari observasi di lapangan dan wawancara mendalam kepada beberapa informan atau subjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan perihal kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 34 keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini, yang menjadi data primer adalah hasil wawancara mendalam dengan pegawai kantor desa dan

---

<sup>18</sup> Azuar Juliadi, *Metode Penelitian Bisnis* (Medan: Unsu Pres, 2014), 112.

keluarga Desa Karangpatihan Kecamatan Balong dan data-data dari observasi langsung dilapangan terkait penelitian.



#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini sebagai pendukung dari data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Datanya diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, jurnal, artikel dan lain-lain mengenai informasi tentang dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.<sup>19</sup> Dalam proses observasi ini peneliti mengamati secara langsung bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerinth desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Karangpatihan dan kontribusi dana BLT yang diterima masyarakat.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.<sup>20</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan mengarah pada kedalaman informasi guna menggali pandangan subyek yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat melalui tatap muka (*Face to face*). Narasumber yang diwawancarai yaitu pegawai kantor dan masyarakat Desa Karangpatihan serta pengelola Bantuan Langsung Tunai (BLT). wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga di Desa Karangpatihan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan, dokumen-dokumen, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen, atau agenda-agenda. Data-data tersebut bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dokumentasi juga sebagai data pendukung dari kegiatan wawancara, observasi, dan juga untuk memperoleh kumpulan data dalam memperkuat pemikiran dan pendapat terkait implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap ketahanan ekonomi keluarga dalam

---

<sup>20</sup> Budur Anufia, Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data", Jurnal STAIN Sorong, Sorong, 2019, h. 08

mengatasi kemiskinan yang ditinjau dari persepektif ekonomi islam.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data yang telah diperoleh dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Reduksi data atau merangkum adalah tahap memilih hal-hal yang pokok dan hanya fokus pada point-point yang sekiranya diperlukan dan membuang data yang tidak digunakan. Reduksi data bisa dilakukan dengan abstraksi yaitu membuat rangkuman data penting terkait proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga reduksi data merupakan penggolongan atau proses pemilihan. pada tahap ini peneliti mengumpulkan setiap data agar diketahui Bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga, Bagaimana Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan, dan bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Kemudian data yang didapatkan tersebut selanjutnya akan disatukan dan dilakukan analisis.

b. Penyajian data (*Display data*)

*Display data* atau penyajian data, dalam tahap ini data- data yang telah terkumpul akan diolah untuk selanjutnya disusun secara rapi agar data tersebut dapat dengan mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti melakukan rangkuman seluruh data-data pokok dan selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan.

c. Kesimpulan (*verifikasi*)

Tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti melalui sumber dan dari segala macam teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teori tersebut bisa berupa deskripsi dan gambaran suatu objek yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala desa, perangkat desa, KPM, dan warga sekitarnya. Penelitian ingin mengetahui implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif Islam.

6. Teknik Analisis Data

Tahap terpenting selanjutnya dalam metode ilmiah adalah analisis data, karena dengan dilakukan analisa data yang diperoleh dapat diartikan dan

diberi makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Setelah data disusun rapi sesuai dengan tema dan dilakukan analisis, kemudian dilakukan penafsiran terkait dengan fenomena yang ada agar bisa ditarik sebuah kesimpulan. Simpulan yang didapat dari proses analisis dan penafsiran yang mengandung implikasi dan saran. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara induktif, yaitu analisis yang dimulai dari data lapangan atau kasus-kasus kemudian diakhiri dengan teori. Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis data induktif. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan ingin mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terkait Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan yang keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan dengan triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 273–74.

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi dengan metode triangulasi sumber, yaitu melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek ulang dan membandingkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan KPM BLT-DD (Keluarga Penerima Manfaat). Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi-informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaringan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini memiliki tujuan agar penyusunan skripsi dapat sesuai dengan bidang kajian. Dan untuk mempermudah pembahasan, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, disetiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai pembahasan yang utuh, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi menjelaskan tentang kerangka dasar penelitian yang berisi mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang di dalamnya terdapat pembatasan serta perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat pengertian-pengertian, dan sifat-sifat yang diperlukan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian. Penelitian terdahulu memuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berfikir menjelaskan alur logika kaitan antar variabel dimana dalam penelitian kuantitatif berupa data, grafik, diagram. Serta hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau penelitian terdahulu dan merupakan jawaban sementara masalah yang dihadapi dan masih harus dibuktikan kebenarannya.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang didalamnya berisi deskripsi atau gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sesuai rumusan masalah yang dibuat.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian.

Kesimpulan ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, dalam penutup juga harus ditulis keterbatasan penelitian dan rekomendasi atau saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan penelitian lebih lanjut



## BAB II

### IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Kebijakan publik

Kebijakan publik sendiri diartikan sangat beragam oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Thomas, R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, Thomas R, Dye mengemukakan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang dimiliki tujuan tertentu, entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumber daya manusia, dll. Dalam sudut pandang yang berbeda Thomas R, Dye menulis kebijakan publik sebagai “*Anything a government choose to do or not do do*” yang mengandung arti bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk merespons isu publik, maka bukan dinyatakan sebagai kehendak atau keinginan semata, tetapi sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan yang terukur.<sup>22</sup>

Selain itu pengertian kebijakan publik menurut Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap

---

<sup>22</sup> Nuryanti Mustari, *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 1 ed. (PT Leutikaprio, 2015), 01.

pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu kebijakan memuat 3 elemen meliputi identifikasi dari tujuan yang dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari suatu strategi.

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Edward dmodel implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yaitu “ Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi”. Menurut Edwards implementasi kebijakan sebagai “ implementasi kebijakan sistem informasi publik merupakan langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang sudah diterapkan sistem informasi politik serta akibat dari kebijakan itu terhadap

---

<sup>23</sup> Mustari, 04.

orang-orang yang dipengaruhi. Menurut Edward faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik itu berhasil atau tidak tergantung 4 variabel atau faktor tersebut antara lain mencakup :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam setiap penanggung jawab kebijakan program yang didukung oleh komunikasi dengan instansi atau organisasi lain.

b. Disposisi

Disposisi memiliki sikap dan pelaksana kebijakan yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan keinginan pelaksana agar tidak terjadi bias akan tetapi jika sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana sesuai yang direncanakan.

c. Sumber Daya

Implementasi Sistem Informasi yang dimaksud dalam sumber daya : a) Kecukupan dan kualifikasi, yang dimaksud adalah Sumber daya manusia memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. b) Sarana prasarana yang dimaksud adalah segala jenis perlengkapan, peralatan kerja juga fasilitas yang memiliki fungsi sebagai pembantu atau alat utama untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi Sistem Informasi yang dimaksud dalam Struktur

Birokrasi adalah Struktur Organisasi Pemerintah desa yang mengelolah dana desa dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Karangpatiha. Yang terdiri dari SOP (standar operasional prosedur) yang dimaksud dalam SOP adalah petunjuk pelaksanaan/ apakah SOP ini menghalangi/ menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan, dan fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi yang melibatkan unit diluar organisasi.

Menurut Udaji, seorang ahli dari Nigeria, mengatakan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai “Suatu rencana tindakan yang disetujui untuk suatu masalah tertentu atau sekelompok masalah terkait yang mempengaruhi seluruh masyarakat”.<sup>24</sup>

Menurut Ripley & Franklin (1986) ada dua hal yang menjadi faktor perhatian dalam implementasi yaitu *Compliance dan What's Happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan mengacu pada apakah pelaksana mematuhi prosedur atau standar yang ditetapkan. Pada saat yang sama, untuk “apa yang terjadi”, pertanyaannya adalah bagaimana proses implementasi dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang dicapai, mengapa dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020

---

<sup>24</sup> Izhar Syafawi dan Moh Nazar Fajri, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021”, Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik), Vol. 6, No. 2, (2021), h. 17–26.” *Jurnal SIKAP*

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>25</sup>

Menurut Wahab implementasi kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statment* saja. Akan tetapi keberhasilan dinilai setelah *policy statment* tersebut di implementsikan meskipun suatu *policy statement* sangat idel, akan tetapi dapat juga gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi. Terkait dengan kebijakan, paling tidak empat elemen untuk dicermati yakni: siapa pelaksana kebijakan, hakekat dari proses administratif, kepatuhan pada kebijakan dan dampak dari proses implementasinya. Keempat tahapan tersebut tentu saja berkaitan dengan aktor yang terlibat atau bersinggungan dengan proses implementasi kebijakan tersebut baik itu sebagai implementornya maupun elemen masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Rangkaian proses untuk melakukan penilaian dari suatu kebijakan tertentu baik yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan

---

<sup>25</sup> Kementerian Keuangan “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT DD”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/40~PMK.07~2020Per.pdf> (diakses pada tanggal 11 April 2023, Pukul 08.12 WIB).

untuk menilai apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan. Paling tidak ada tiga elemen penting yang dipakai dalam menganalisis kebijakan yakni: pertama, siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output kebijakan tersebut, kedua, bagaimana reaksi terhadap kegiatan tersebut, ketiga, bagaimana kebijakan dapat merubah perilaku mereka. Kegiatan maupun wewenang dari pemerintah daerah, namun seringkali banyak pihak diluar pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan berbagai alasan atau target yang ingin dicapai.<sup>26</sup>

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik atau tidak.<sup>27</sup>

Hadirnya kebijakan publik ini ditengah kehidupan masyarakat lewat tindakan keputusan publik berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh sebab itu, di berbagai tingkatan dalam proses tersebut akan banyak pula orang yang terlibat di dalamnya. Meskipun, demikian dalam dalam realita politik, apa yang disebut dengan istilah “Kebijakan (*Policy*)” itu seringkali penggunaannya dalam

---

<sup>26</sup> Syafawi dan Fajri, “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021.”

<sup>27</sup> Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol. 01 No. 01 (2018): 54–65.

komunikasi politik saling dipertukarkan (*interchangeable*) dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar (*grand design*) yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Friedrich maupun Knoepfel dan kawan-kawan menemukan sebuah pemahaman baru yaitu:<sup>28</sup>

- a. Fokus perhatian saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar dipikirkan atau ingin dilakukannya.
- b. Harus bisa membedakan secara tegas antara kebijaka (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif yang dianggap tersedia.
- c. Jika menelusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecah masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya di berikan untuk memecahkan atau setidaknya mengurai kerumitan masalah publik, yaitu masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*government agenda*).

Agenda pemerintah (*government agenda*). Dengan demikian,

---

<sup>28</sup> Diana Nabillah Putri, “Analisis Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid -19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi,” *Sekripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022, 24.

kebijakan apapun mencerminkan respons/tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, yang secara politis dianggap tidak bisa ditoleransi. Sebaik apapun kebijakan itu dibuat tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa, sehingga pihak implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini sangat penting dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai.

## **B. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

### **1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Selain itu sebagian besar sektor industri juga mengalami penurunan yang sangat pesat seperti, UMKM, terutama pada sektor pariwisata dan ritel juga merasakan dampak negatif yang signifikan. Dampak tersebut juga mempengaruhi daya beli masyarakat yang ikut menurun. Guna mengurangi dampak negatif akibat pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program-program sosial sebagai penguat perlindungan sosial dan sebagai stimulus ekonomi, diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan sosial uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi keluarga miskin akibat dampak pandemi COVID-19. Tujuan dari rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna menjaga daya beli masyarakat

pada masa pandemi. Semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menysar warga yang terdampak secara langsung maupun tak langsung. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2020 adalah Rp. 600.000.- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan bebas pajak. Untuk bulan selanjut nya masyarakat mendapatkan bantuan sebesar Rp. 300.000 per bulan dari Dana Desa. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk BLT kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).<sup>29</sup> sebagaimana dalam peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang di antaranya juga berkaitan penyediaan BLT yang bersumber dari Dana Desa. Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah :

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

---

<sup>29</sup> Mulyadi, Wawancara, 03 April 2023.

Bantuan ini menuai banyak respon dari masyarakat semenjak dikeluarkannya, banyak yang memberikan respon positif namun tidak sedikit yang memberikan respon negatif. Penyebabnya karena bantuan ini dirasa tidak tepat sasaran dan tidak merata. Masyarakat banyak mengkritik bahwa yang terdampak bukan hanya sebagian masyarakat saja, namun seluruh masyarakat yang berada di kota-kota yang telah terjangkau juga terkena dampaknya. Masyarakat hanya berharap pemerintah dapat lebih selektif lagi dalam penyaluran bantuan. Setiap masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus terbagi sama rata. Dan tidak adanya proses pungli selama pemberian bantuan ini.

Agar program BLT dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis, agar tercapai tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
- b. Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada BLT, maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha

sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya menggantungkan dari bantuan selain itu dapat mengurangi tingkat pengangguran.

BLT ini juga telah diterbitkan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu di dukung data yang valid dan akurat. Dasar hukum pendataan BLT yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya di desa sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri
- d. Peraturan Menteri Keuangan
- e. Intruksi Menteri Dalam Negeri
- f. Intruksi Menteri Desa PDTT

---

<sup>30</sup> Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020* (KOMPAK, 2020), 03.

- g. Surat Menteri Desa PDT
- h. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan
- i. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Desa Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error).

Yang memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>31</sup> :

- a. Tidak mendapat bantuan (PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja)
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Desa dapat menentukan sendiri calon penerima BLT selama mengikuti kriteria yang diterapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja.

Adapun mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penetapan pendataanya

---

<sup>31</sup> Sanusi, wawancara 07.

sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a. Proses Pendataan
- b. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- c. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT.
- d. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- e. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan, atau di tingkat dusun menggunakan aplikasi.

## **2. Penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan Pasal 5 yaitu :

---

<sup>32</sup> Sanusi, 11.

- a. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa.
- b. Pengalokasian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kemudian berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pasal-pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 pasal 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 1. Alokasi dasar 2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten /kota.<sup>33</sup>

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima

---

<sup>33</sup> “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)..
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan).

Pemberian alokasi dana desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain:<sup>34</sup>

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa.

---

<sup>34</sup> Abu Rahman, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015.

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dengan adanya wabah virus covid-19 saat ini akhirnya kementerian desa nyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selain itu aturan ini mengatur secara tegas bahwa penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial seperti kesehatan masyarakat. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mempergunakan dana desa tersebut dalam berbagai aspek seperti penanganan dampak penyebaran covid-19 yang sesuai dengan protokol dan intruksi gugus tugas covid-19 di daerah. Dari dana desa tersebut memiliki beberapa keunggulan seperti :

- a. Alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai;

dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

- c. Tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada.
- d. Dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas Pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara local.
- e. Serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas dana desa.

### **C. Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari guncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidakseimbangan dalam keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi ketahanan ekonomi keluarga adalah suatu rencana untuk pengambilan keputusan keluarga dalam bertahan dan menciptakan kondisi baru saat terjadi krisis ekonomi melalui observasi lingkungan, perencanaan jangka

panjang berdasarkan sumber daya yang dimiliki, implementasi, evaluasi dan pengendalian guna mencapai keberhasilan tujuan untuk hidup layak dan mandiri.<sup>35</sup>

#### **D. Indikator Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan. Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi, yaitu<sup>36</sup>:

##### **1. Ketersediaan tempat tinggal keluarga**

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangunan ketahanan ekonomi keluarga yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik.

---

<sup>35</sup> Mohammad Lutfi, "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim," *Jurnal Syar'ie* Vol.3 No 2 (2020): 184-97.

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Riyadh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016).

## **2. Memiliki pendapatan perbulan keluarga**

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga yang diatur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang baik.

## **3. Pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi**

Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi keluarga tersebut, karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak.

### **a. Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak**

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) tanpa memungut biaya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun, kebijakan biaya sekolah gratis hanya berlaku bagi murid yang bersekolah di SD ataupun SMP negeri, itupun belum berlaku secara nasional. Pada sekolah tertentu masih terdapat pungutan biaya yang besarnya bervariasi yang ditentukan oleh komite sekolah. Selain itu sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia sekolah, sehingga hanya siswa dengan nilai bagus yang mampu bersaing untuk diterima di sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan sebagian siswa harus melanjutkan di sekolah swasta yang membutuhkan biaya yang lebih besar daripada sekolah negeri.

b. Keberlangsungan pendidikan anak

Keberlangsungan pendidikan anak akan digambarkan melalui rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana seseorang yang berusia sekolah 7-19 tahun tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalaninya. Selain tidak ada yang putus sekolah, rumah tangga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota rumah tangganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

#### 4. Memiliki jaminan keuangan keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variable pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variable jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

##### a. Tabungan keluarga

Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Tabungan keluarga mencakup finansial rumah tangga antara lain kepemilikan tabungan dan jenis tabungan. Tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis:

- 1) Produk bank (tabungan/asuransi/deposito/giro)
- 2) Produk non-bank (koperasi/kantor pos/sekolah)
- 3) Produk lainnya (tabungan di lemari/dompot/celengan/dan sebagainya)

##### b. Jaminan Kesehatan Keluarga

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi adalah kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi

kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia karena kehidupan manusia sehari-hari didominasi dengan kegiatan ekonomi.<sup>37</sup> Tetapi kebutuhan hidup manusia itu banyak dan beraneka ragam dan terus bertambah. Satu kebutuhan manusia terpenuhi maka akan muncul kebutuhan kedua, kebutuhan kedua terpenuhi akan muncul kebutuhan ketiga dan seterusnya seperti tidak pernah ada habisnya. Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, langka dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Keterbatasan alat pemuas kebutuhan merupakan masalah dari segala sumber masalah ekonomi maka harus dilakukan pilihan

Dalam islam, indikator ketahanan ekonomi keluarga tercermin dalam kriteria kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin<sup>38</sup>. Dalam ilmu fikih yang dimaksud adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam islam kebutuhan tersebut hanya kebutuhan dasar, bukan memenuhi kebutuhan dalam skala yang luas. Adapun orang yang miskin adalah orang fakir

---

<sup>37</sup> Mohammad Lutfi, "PERBANKAN SYARI'AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" 1 (2019): 49.

<sup>38</sup> Nur Kasanah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di UPIZ NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Jurnal of Islamic Philantrophy and Disaster* 01 No. 01 (2021): 71.

yang meminta-minta, dan secara umum kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kaum fakir<sup>39</sup>. Adapun program yang bersifat produktif bagi mustahik (orang kurang mampu/miskin) adalah dengan memberikan mereka sebuah usaha agar mereka memiliki penghasilan<sup>40</sup>.

Muhammad `Ali al-Shabuny berpendapat, fakir adalah orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dan tidak memiliki harta lebih dari itu. Sedangkan definisi miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun. Namun ia juga menyebut suatu pendapat, yang menyatakan bahwa kondisi orang miskin masih lebih baik dibandingkan dengan orang fakir. Kondisi ekonomi yang dialami masing-masing kelompok di atas mencerminkan kondisi kemiskinan, lemah secara ekonomi, dan identik dengan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka, terentasnya kelompok-kelompok dari kondisi semula dapat dijadikan indikator ketahanan ekonomi keluarga. Mereka yang tidak lagi teridentifikasi lagi sebagai *miskin*, *fakir*, dan *gharimin* mengandung arti telah memiliki kecukupan ekonomi dan kekuatan untuk bertahan dari keterpurukan<sup>41</sup>.

## E. Ekonomi Islam

<sup>39</sup> DEKS Bank Indonesia P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016).

<sup>40</sup> Nurma Fitrianna, "Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Khusus Lazismu KL BMT Hasanah Ponorogo)," *Journal Of Islamic Philantrophy and Disaster (JOIPAD)* 01 No.01 (2021): 55–70.

<sup>41</sup> Mohammad Lutfi dan Safitri, "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 03, No.02, 2020. 187

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-quran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Al-quran dan Sunnah. Digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Al-quran dan sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktik.

Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui sesuatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Menurut As-Shatibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke *mashlahah-an*, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-maal*) dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*). Kelima *mashlahah* tersebut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

## 1. Peran Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan islam, masyarakat bisa diartikan secara sempit maupun luas dan hierarki ini terkait tanggung jawab dan hak masing-masing. Dalam lingkup yang paling kecil setelah individu adalah masyarakat keluarga. Keluarga (*ahl*) diakui sebagai pilar terbentuknya masyarakat. Islam mengatur tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masing-masing anggota keluarga. Pembangunan masyarakat diawali dari pembangunan individu dan keluarga. Tingkat masyarakat selanjutnya adalah komunitas bertetangga. Dalam hal ini setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam bertetangga dan tanggung jawab komunitas bertetangga terhadap anggotanya. Masyarakat yang ketiga adalah masyarakat dalam satu negara, dan yang keempat adalah masyarakat sedunia. Seorang muslim memiliki tanggung jawab terhadap nasib sesama muslim di belahan negara lain sebatas apa yang mampu ia kerjakan<sup>42</sup>.

## 2. Kebutuhan Ekonomi Keluarga Dalam Islam

Beberapa peneliti membagi kemaslahatan menjadi dua macam, yaitu kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah, dan kemaslahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Pada kenyataanya tidak ada korelasi yang mengharuskan untuk memperhatikan pembagian antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Pada dasarnya segala hal

---

<sup>42</sup> Ibid. 85

yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalat dalam syariat islam menjamin segala kemaslahatan umat baik dunia mauapun akhirat<sup>43</sup>.

Asy-Syatibi (1997: 8-9) membagi masalah pada tiga tingkatan, yakni:

a. *Maslahah daruriyyah* (kebutuhan primer)

Maslahah daruriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia di mana apabila maqāsid ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia serta di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Menurut Asy-Syatibi, maqāsid ini terdiri dari lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan seperti perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi.

b. *Maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder)

Maslahah hajiyyah adalah maqasid yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika maqāsid hajiyyah ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak akan merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).

---

<sup>43</sup> Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, Vol. 14, No. 09, 2018

c. *Maslahah tahsiniyyah* (kebutuhan tersier)

Maslahah tahsiniyyah adalah maqāṣid yang mengacu pada pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah shalat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.



## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG**

#### **A. Gambaran Umum Desa Karangpatihan Kecamatan Balong**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan Kecamatan Balong**

Desa Karangpatihan adalah desa yang terletak di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, desa ini merupakan desa yang letaknya cukup jauh dari pusat Kota Ponorogo. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Karangpatihan berada di wilayah selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administrasi memiliki luas wilayah ± 1.336.6 hektar, dan ketinggian wilayah sekitar 7 mdpl di daerah rendah dan 153,3 mdpl ( meter di atas permukaan laut ). Kondisi cuaca dan klimatologi di Desa Karangpatihan memiliki suhu rata-rata harian 31° C. berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Secara administrasi, desa Karangpatihan dibatasi oleh:

Sebelah Utara	: Desa Jonggol Kecamatan Balong
Sebelah Selatan	: Desa Ngendut Kecamatan Balong
Sebelah Barat	: Hutan Negara/Kabupaten Pacitan
Sebelah Timur	: Desa Sumberejo Kecamatan Balong

Keberadaan Desa Karangpatihan yang berada di daratan rendah telah menguatkan bahwa untuk sektor pertanian menjadi salah satu mata pencarian tetap masyarakat. Desa Karangpatihan yang merupakan desa yang berada paling barat dari kecamatan dan berbatasan langsung dengan hutan negara, Desa Karangpatihan menyimpan berbagai potensi yang dapat dikembangkan guna memperbaiki berbagai sektor lainnya. Desa Karangpatihan membagi wilayahnya menjadi empat dusun yaitu , Dusun Bendo, Dusun Bibis, Desa Krajan, Dusun Tinggungrejo. Setiap dusun memiliki potensi yang berbeda dan mendapat penanganan langsung dari masyarakat.

## 2. Kondisi Demografi dan Administratif Desa

Jumlah penduduk yang ada di Desa Karangpatihan adalah sebanyak 5.887 jiwa atau 2.152 KK, yang terdiri dari 2.935 Laki-laki dan 2.952 Perempuan. Dari jumlah KK tersebut masyarakat desa hidup dengan kondisi yang beragam, antara lain di Desa Karangpatihan terdapat 302 KK warga yang tergolong berada dalam garis kemiskinan, sedangkan kondisi masyarakat desa yang berada pada garis rentan miskin mencapai 558 KK. Selain itu Desa Karangpatihan juga terkenal dengan masyarakat idiotnya, hal ini selaras dengan data desa yang menunjukkan bahwa terdapat 42 KK warga yang mengalami idiot atau tunagrahita. Selebihnya adalah 893 KK rata-rata dan 89 jiwa ODK. Secara Administrasi Desa Karangpatihan memiliki luas wilayah 1.336,6 Ha, diantaranya adalah 109 Ha perumahan

dan pekarangan, 17 Ha sawah setengah teknis, 164 Ha sawah tadah hujan, 355 Ha ladang/tegalan kering, 171,5 Ha tanah tandus (kritis), 401,1 Ha hutan kering dan berikutnya 119 Ha kuburan dan lain-lain. Seperti kondisi desa dari data pembagian luas tanah yang ada di Desa Karangpatihan tersebut, paling besar tanah di desa tersebut hanyalah tegalan kering, tanah tandus dan hutan kering. Dengan luas wilayah 1.336,6 Ha, Desa Karangpatihan terdiri dari 4 (Empat) dusun, yakni Dusun Krajan, Dusun Bibis, Dusun Bendo dan Dusun Tanggungrejo. Dari 4 (Empat) dusun tersebut terdapat 34 RT dan 8 RW dengan jumlah perangkat desa sebanyak 17 orang.

### 3. Perekonomian dan Sarana Prasarana

Perekonomian Desa Karangpatihan didukung oleh sektor pertanian, mayoritas masyarakat desa selama ini menghabiskan waktunya untuk berladang atau di ladang sebagai salah satu pusat mata pencarian mereka. Akan tetapi kondisi desa yang berada di lereng pegunungan memaksa masyarakat desa hanya dapat memanen padi hanya satu kali dalam satu tahun, yakni pada kondisi musim hujan. Ketika musim kemarau ladang masyarakat desa hanya bisa ditanami oleh beberapa jenis tanaman, misalnya singkong, jagung, dan lain sebagainya. Singkong menjadi pilihan kedua masyarakat desa karangpatihan untuk dijadikan tiwul apabila panen masyarakat desa sudah menipis.

Selain pada sektor pertanian, masyarakat Desa Karangpatihan

selama ini menggantungkan hidup juga dari sektor peternakan. Dari berbagai ternak yang ada, selama ini masyarakat desa memilih untuk mengembangkan ternak kambing dan ayam, tercatat di Desa Karangpatihan kini setiap rumah memiliki hewan peliharaan yang terdiri dari sapi, kambing dan ayam. Sedangkan untuk penyandang tunagrahita, selama ini peternakan yang dikembangkan adalah ternak lele.

Kolam lele merupakan usaha yang diberikan pemerintahan desa untuk para penyandang tunagrahita. Perikanan di Desa Karangpatihan menerapkan budi daya lele yang dikelola oleh penderita tunagrahita. Setiap penyandang tunagrahita memiliki kolam-kolam ikan yang merupakan sebagai salah satu penopang perekonomian mereka setiap hari. Keuntungan membeli ikan dari mereka adalah saudara kita yang menderita tunagrahita atau keterbelakangan mental, sehingga dengan begitu mereka akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Karangpatihan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan kelapa sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain.

Fasilitas penunjang aktivitas di Desa Karangpatihan selama ini

terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki. Di desa tersebut terdapat 9 km jalan yang sudah dalam kondisi di aspal, sedangkan jalan yang masih pada kondisi makadam mencapai 9 km. Yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah, kondisi jalan yang berada dalam keadaan masih tanah saat ini masih mencapai 11 km, hal ini menjadi salah satu hambatan masyarakat desa dalam beraktivitas. Sedangkan perpipaan air bersih yang dapat dikonsumsi masyarakat masih 2 unit, selebihnya masyarakat desa menggunakan sumur pribadi.

Faktor penunjang lainnya adalah Kantor/Balai Desa. Selama ini kondisi kantor desa Karangpatihan kurang dari layak untuk dipakai sebagai pusat informasi dan data desa. Namun, selama 2 bulan terakhir ini masyarakat desa mulai memperbaiki dengan membangun kantor desa yang baru. Faktor penunjang selebihnya adalah terdapat 4 Unit Sekolah Dasar Negeri dan 3 Unit TK Dharma Wanita.

#### 4. Visi dan Misi Desa Karangpatihan

Visi :

Visi Desa Karangpatihan adalah “ Terwujudnya Masyarakat Desa yang Sejahtera dan Dinamis dalam Nuansa Religius dan Berwawasan Lingkungan Sebagai Desa Pendidikan dan Wisata”.

Misi :

- a. Mewujudkan pemerintah desa yang bersih, amanah, dan transparan, serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;

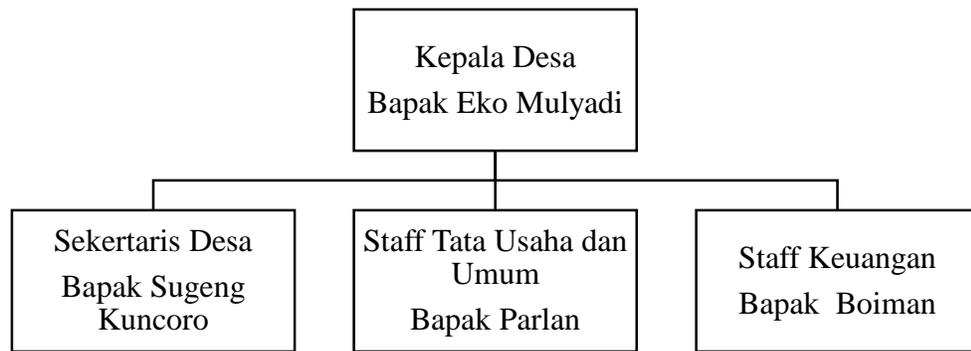
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis iman dan takwa; dan
- d. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib, dan teratur.

#### 5. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi, badan usaha ataupun instansi memerlukan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan antara setiap posisi yang ada pada suatu perusahaan atau usaha untuk menjalankan kegiatan operasional guna mencapai tujuan.

Struktur organisasi bertujuan untuk membagi porsi karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing orang, serta mengetahui apakah pekerjaan berjalan dengan baik atau tidak. Maka seseorang yang terlibat pada posisi dan job masing-masing dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan.

**Tabel 3.1**  
Struktur Organisasi Desa Karangpatihan



**B. Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong**

Dalam Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong menggunakan teori Edward, Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan Disposisi :

1. Komunikasi

- a. Komunikasi adalah salah satu indikator untuk menemukan masalah yang ingin di teliti peneliti. Komunikasi yang dilakukan di Desa Karangpatihan ini melalui musyawarah desa yang nantinya akan disampaikan kepada KPM. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Sugeng Kuncoro : Untuk penyaluran informasi sendiri kita langsung bagikan lewat grup wa MUSDESUS yang nantinya akan dirapatkan dan dibagikan informasinya

kepada masyarakat atau KPM desa Karangpatihan mengetahui siapa saja nama-nama yang terpilih dalam penerimaan BLT ini sendiri.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Kuncoro selaku aparat desa Karangpatihan dapat disimpulkan menyebutkan bahwa penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah efektif, hal ini dapat terlihat dari upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa Karangpatihan.

- b. Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekertaris desa Karangpatihan Bapak Sugeng Kuncoro : Aparatur desa menginfokan melalui sosial media aplikasi facebook, dan WA kemudian melakukan pertemuan antar BPD, pemerintah desa, kepala dusun rt/rw agar dapat menyampaikan kepada warga desa Karangpatihan mengenai penerima bantuan langsung tunai<sup>45</sup>. Sedangkan kejelasan komunikasi dari sisi masyarakat yang dilakukan wawancara dengan penelit yaitu KPM Ibu Kati: “Saya tahu bahwa

---

<sup>44</sup> Sugeng Kuncoro, Wawancara, 06 April 2023.

<sup>45</sup> Kuncoro, Wawancara 06 April 2023

saya menerima bantuan karena saya di panggil langsung oleh ketua RT untuk menerima bantuan tersebut di kantor desa Karangpatihan” .<sup>46</sup>

- c. Konsistensi Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil harus tetap sasaran agar menimbulkan kecemburuan social kepada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris desa : Kalau kita pemerintah desa tetap konsisten dan tepat sasaran karena dalam penerimaan BLT di desa Karangpatihan ini dilakukan melalui musyawarah bukan dengan satu dua orang saja tetapi di undang kepala dusun, RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat untuk memilih siapa yang layak menerima bantuan tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan maka disimpulkan bahwa konsisten merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam implemntasi program Bantuan Langsung Tunai, dan harus tepat sasaran karena banyaknya masyarakat yang protes dan menimbulkan kecemburuan social karena tidak mendapatkan bantuan tersebut.

## 2. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi suatu program. Apabila pelaksana setuju dengan isi dan maksud kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan

---

<sup>46</sup> Kati, Wawancara, 26 April 2023.

<sup>47</sup> Kuncoro, Wawancara, 26 April 2023.

senang hati. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat disposisi atau sikap dari pelaksana program bantuan sosial. Berikut hasil Wawancara peneliti: Tentu saja masyarakat senang dengan adanya bantuan langsung tunai, ini dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa dibantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan membeli bahan makanan ataupun keperluan lainnya.<sup>48</sup>

Dilanjutkan dengan pernyataan salah satu masyarakat penerima bantuan : “Saya sangat senang dengan adanya program ini, karena adanya bantuan selain bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa digunakan untuk menambah modal saya jualan nasi pecel. Yang tadinya hasil jualan saya hanya cukup untuk makan, sekarang sudah bisa menyisihkan uang untuk keperluan lain”.<sup>49</sup>

Berikut kesimpulan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai ini sangat didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Yang tadinya pengasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu dalam memberikan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.

### 3. Sumber Daya

#### a. Sumber daya manusia

---

<sup>48</sup> Katiyem, Wawancara, 26 April 2023.

<sup>49</sup> Katinah, Wawancara , 26 April 2023.

Sumber daya manusia sangat di perlukan guna untuk melancarkan proses penyaluran bantuan langsung tunai di desa Karangpatihan. Dalam program ini, semua staf desa terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) , Berikut wawancara yang dilakukan peneliti Kepala Desa: Semua staff itu terlibat dalam pelaksanaan penyaluran BLT termasuk kepala dusun, namun yang paling penting itu kasi keuangan karena dia yang ditanggung jawabkan untuk program ini, kalau staf hanya membantu<sup>50</sup>. Dilanjutkan wawancara ke pihak sekertaris Desa Karangpatihan Bapak Kuncoro: “Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini terdapat 34 masyarakat yang terpilih menerima bantuan langsung tunai”<sup>51</sup>.

**Tabel 3.2**  
Nama Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai

NO	NAMA	ALAMAT
1	MISEYEM	RT 001 RW 001 KRAJAN
2	YATMINI	RT 005 RW 001 KRAJAN
3	LASMI	RT 001 RW 002 KRAJAN
4	WAGINEM	RT 001 RW 001 BIBIS
5	KATI	RT 002 RW 002 BIBIS
6	SARIP RIADI	RT 002 RW 002 BIBIS
7	SIPON	RT 001 RW 001 BENDO
8	RAHWIDJI	RT 001 RW 002 BENDO
9	GOMBLAH/SANIAH	RT 004 RW 002 BENDO
10	SIPON	RT 004 RW 002 BENDO
11	TUKIMIN	RT 001 RW 001 TANGGUNGREJO

<sup>50</sup> Mulyadi, Wawancara, 28 April 2023.

<sup>51</sup> Kuncoro, Wawancara, 26 April 2023.

12	SEKEN	RT 001 RW 001 TANGGUNGREJO
13	PANIRAN	RT 002 RW 001 TANGGUNGREJO
14	MISKUN	RT 002 RW 001 TANGGUNGREJO
15	LANIMAN	RT 004 RW 001 TANGGUNGREJO
16	MISNO	RT 004 RW 001 TANGGUNGREJO
17	BIBIT	RT 004 RW 001 TANGGUNGREJO
18	KATINAH	RT 005 RW 001 TANGGUNGREJO
19	LASMI	RT 005 RW 001 TANGGUNGREJO
20	SUTI	RT 006 RW 001 TANGGUNGREJO
21	NYAMI	RT 006 RW 001 TANGGUNGREJO
22	UMI FATIMAH	RT 006 RW 001 TANGGUNGREJO
23	SAIMUN	RT 001 RW 001 BENDO
24	JOKO SETIAWAN	RT 002 RW 001 BIBIS
25	TUMINI	RT 001 RW 002 TANGGUNGREJO
26	LILIK SUGIARTI	RT 002 RW 002 TANGGUNGREJO
27	PUJI LESTARI	RT 002 RW 002 TANGGUNGREJO
28	MUJI	RT 004 RW 002 TANGGUNGREJO
29	KATIYEM	RT 004 RW 002 TANGGUNGREJO
30	KADEMI	RT 005 RW 002 TANGGUNGREJO
31	WONI	RT 005 RW 002 TANGGUNGREJO
32	ZUHRIYAH	RT 003 RW 001 BENDO
33	WAGIYEM	RT 004 RW 001 BENDO
34	GANDI	RT 002 RW 001 BIBIS

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa penyaluran program bantuan langsung tunai sebanyak 34 masyarakat miskin yang menerima bantuan langsung tunai dari empat dusun.

PONOROGO

4. Struktur birokrasi dalam implementasi program bantuan langsung tunai terdapat 2 karakteristik utama yaitu: SOP (standar operasional prosedur), dan fragmentasi:

1) SOP

SOP adalah suatu prosedur atau tahap tahap pencairan dana bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berikut wawancara peneliti dengan sekretaris Desa:

Untuk tahap pencairan ada prosesnya yang pertama harus selesai laporan realisasi pada penerimaan sebelumnya, kalau sudah selesai kita ajukan berkas persyaratan yang diminta ke pemdes, kemudian pemdes yang ajukan ke pusat nanti setelah dana cair ke pemerintah desa dilakukanlah pencairan dengan tahapan ada spp dan kasi kaur setelah spp diadakan akan dicairkan dana, setelah dana di cairkan diakanlah penerimaan BL<sup>52</sup>.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Boiman Selaku Staff

Keuangan:

Untuk persyaratan penyaluran bantuan langsung tunai di desa Karangpatihan cukup gampang ,kita hanya memerlukan kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk (KTP) dan untuk sertivikat vaksin hanya diperlukan sampai bulan april kemarin untuk penerimaan selanjutnya sertifikat vaksin sudah tidak di perlukan lagi<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Kuncoro, 26 April 2023.

<sup>53</sup> Boiman, "Wawancara", 29 April 2023.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa SOP ini tidak menyulitkan/menghalangi Pemerintah desa Karangpatiahan dalam tahap pencairan BLT. oleh karena itu SOP cukup membantu pemerintah desa untuk melancarkan pencairan dana bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu penyaluran harus sesuai SOP supaya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat tersalurkan dengan baik dan adil tepat sasaran tidak memberatkan bagi penerima

a. Fragmentasi

Merupakan penyebaran tanggung jawab pada beberapa organisasi. Fragmentasi menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi dikarenakan semakin tersebar tanggung jawab pada banyak organisasi maka semakin memerlukan koordinasi yang lebih intensif, apabila tidak maka akan dengan mudah terjadi kesalah pahaman yang akan menghambat keberhasilan suatu implementasi. Sebaliknya jika tanggung jawab dipegang oleh satu organisasi saja maka akan dapat dengan mudah mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bapak Eko

Mulyadi :

“Tentu saja, dalam struktur birokrasi saya kira semua sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya pada bagian

pelayanan oleh Bapak Parlan, beliau melayani masyarakat dalam hal persuratan”.

Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di desa karangpatihan sudah baik karena penyaluran yang tersusun baik dan dijalankan sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing pemerintah desa, dan tidak lepas dari SOP sehingga setiap bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anggotanya.

### **3. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga**

Ketahanan ekonomi keluarga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga. Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga, dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Ketahanan ekonomi keluarga memiliki beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga, diantaranya yaitu:

#### **1. Ketersediaan tempat tinggal atau tempat tinggal keluarga**

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran

ketahanan ekonomi suatu rumah tangga, karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Karangpatihan Kecamatan Balong untuk tempat tinggal sudah lebih baik karena tempat tinggal sudah milik sendiri walaupun rumah yang ditempati sederhana dan bervariasi ada yang dibangun dari papan dan sebagian sudah bangunan tembok. Dan ada beberapa keluarga penerima bantuan masih menumpang dengan orang tuanya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Wagiyem selaku KPM sebagai berikut:

Dana BLT membantu saya dalam kebutuhan kak, selain untuk kebutuhan selebihnya saya gunakan untuk modal jual online. Dan juga ini karena saya masih tinggal dengan orang tua jadi saya juga harus mandiri mencari uang ya dari jualan online itu kak, karena kalau buka warung pun saya belum bisa<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara lain yang dikemukakan oleh Bapak Joko Setiawan selaku KPM sebagai berikut:”Untuk memenuhi kebutuhan dana BLT sudah cukup tetapi belum bisa maksimal. Untuk tempat tinggal saya sekeluarga masih punya orang tua, ya istri saya

---

<sup>54</sup> Wagiyem, Wawancara, 26 April 2023.

hanya bisa membantu orang tua untuk jualan sarapan pagi selebihnya ya saya untuk mencari nafkah keluarga”<sup>55</sup>

## 2. Pendapatan Keluarga

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga yang akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Yang pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif, akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan, memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Dalam penelitian ini pendapatan keluarga melihat dari indikator subjektif yaitu melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 mampu membantu mereka untuk menambah pendapatan dan mencukupi kebutuhan. Bapak Sarip Riadi KPM ketika diwawancarai menuturkan bahwa:

---

<sup>55</sup> Joko Setiawan, Wawancara, 26 April 2023.

Pandemi covid-19 sangat beerdampak bagi keluarga saya, dengan saya sebagai kepala keluarga hanya bekerja sebagai buruh. Saya hanya pekerja buruh jadi ngga menentu pendapatan saya perbulan, kira-kira ya Rp. 500.000- Rp. 1.000.000 kalau di hitung-hitung, itu juga pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi belum ditambah kebutuhan lainnya. Bersyukur ada dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga saya, ini sangat membantu kami terutama untuk kebutuhan utama yaitu kebutuhan pokok seperti sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selebihnya kami gunakan untuk kebutuhan lainnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara lain yang dikemukakan oleh Ibu Katinah selaku KPM sebagai berikut:

Saya bekerja sebagai pedagang warung sembako ya segala kebutuhan saya ambil dari hasil warung ini kak, apalagi ada pandemi ini ya walaupun sembako tetap dibutuhkan orang tetap saja, ada penurunan lah dari yang sebelumnya. Dan saya dapat dana BLT, ini sangat membantu saya yang tadinya saya seorang janda tidak ada kepala keluarga, saya punya anak dua jadi kebutuhan sehari-hari ini harus dipenuhi.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara lain yang dikemukakan oleh ibu Sipon selaku KPM sebagai berikut:

Saya saat ini yang menjadi kepala keluarga, Semenjakl adanya dana BLT ini ya sangat terbantu, saya untuk kebutuhan sehari-hari tidak ada lainnya lagi kak. Sebelumnya saya jualan di sekolahan kak karena pandemi ini jadi kan sekolah libur saya terpaksa tidak jualan lagi dan tidak ada tambahan pendapatan kak. Anak saya ada 3 dan ya paling untuk kebutuhan selain kebutuhan pokok itu saya, cari dengan saya bekerja di ladang orang dan anak saya yang pertama juga

---

<sup>56</sup> Sarip Riadi, Wawancara, 28 April 2023.

<sup>57</sup> Katinah, Wawancara, 26 April 2023.

begitu.<sup>58</sup>

Seperti halnya dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga penerima bantuan, mereka menggunakannya sebagian untuk biaya tambahan modal usaha seperti usaha warung sarapan pagi, menjual bakso bakar, gorengan dan lain sebagainya. Berikut uraian wawancara oleh Bu Umi Fatimah sebagai berikut:

Saya bekerja sebagai seorang penjual sarapan pagi di desa Bendo, waktu itu karena ada pandemi covid-19 saya lama tidak berjualan. Saya seorang janda suami sudah tidak ada lagi, tidak punya kebun, rumah hanya warisan dari suami jadi saya yang harus menanggung dan menafkahi anak tinggal 1 dan belum dapat kerja. Ada kabar dari desa bahwa saya diikutsertakan menjadi KPM BLT, Alhamdulillah bersyukur saya mendapatkan dana ini, saya bisa punya modal walaupun sedikit untuk berjualan, biar bisa memiliki pemasukan walaupun cukup untuk makan.<sup>59</sup>

Juga sama yang dikatakan oleh Pak Muji dan Pak Saimun yang diwakili oleh istrinya, selain untuk kebutuhan sehari-hari mereka memanfaatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut untuk tambahan biaya modal usaha. Dari Pak Muji menyampaikan sebagai berikut: “Dana BLT selain untuk beli beras dan minyak atau kebutuhan sehari-hari, dana itu juga saya gunakan untuk tambahan biaya modal usaha menjual bakso bakar di depan rumah”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sipon, Wawancara, 26 April 2023.

<sup>59</sup> Siti Fatimah, Wawancara, 26 April 2023.

<sup>60</sup> Muji, Wawancara, 3 Mei 2023.

Begitu juga yang dikatakan oleh Pak Saimun yang diwakilkan oleh istrinya, beliau mengatakan bahwa: “Selain untuk kebutuhan sehari-hari saya juga menjual makanan ringan seperti pudding kelapa, kalau ada pesanan ya saya buat dan modal dibantu sama dana BLT itu”<sup>61</sup>.

Selanjutnya wawancara terhadap KPM ibu Katiyem sebagai berikut: “Saya yang hanya bekerja sebagai petani ladang, dan sebagai kepala keluarga yang tidak memiliki pendapatan tetap sangat bersyukur mendapatkan bantuan BLT ini, selain untuk kebutuhan pokok juga saya gunakan untuk membeli pupuk”<sup>62</sup>

Dari wawancara yang dilakukan peneliti di atas menunjukkan bahwa dengan adanya dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) sangat membantu dalam kebutuhan sehari-hari, yang awalnya kekurangan setelah adanya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) mereka merasa cukup untuk kebutuhannya. Dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pokok, sebagian dari mereka yang memiliki usaha dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal dan akan terus berputar uang tersebut dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

### 3. Pembiayaan Pendidikan Anak

Pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara

---

<sup>61</sup> Saimun, Wawancara, 3 April 2023.

<sup>62</sup> Katiyem, Wawancara, 26 April 2023.

menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dia indikator, yaitu kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak<sup>63</sup>. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pembiayaan pendidikan anak dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih kepada kemampuan keluarga untuk membiayai anak sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Zuhriyah yang diwawancarai di rumahnya. Beliau mengatakan bahwa:

Suami saya hanya bekerja buruh, gajinya tidak seberapa, pekerjaannya tidak menentu ada kak. Penghasilannya suami saya Rp. 700.000-Rp 1.000.000. Saya mendapat dana BLT ini alhamdulillah kami terbantu dengan adanya dana bantuan tersebut. Bantuan dana BLT ini kami belikan sembako seperti beras, minyak dan lain sebagainya. Selain untuk kebutuhan, selebihnya uang saya pakai untuk biaya anak sekolah membayar SPP.<sup>64</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh Pak Muji , beliau mengatakan bahwa:

Dana bantuan ini sangat membantu kami, apalagi karena covid saya yang tidak bekerja karena saya dikeluarkan akibat sepi nya produksi. Saya saat ini bekerja sebagai buruh,

---

268. <sup>63</sup> Badan Badan Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016),

<sup>64</sup> Zuhriyah, Wawancara, 3 Mei 2023.

kalau ada kerjaan di ladang orang ya saya bekerja, kalau tidak ada ya saya tidak bekerja. Manfaat dana BLT ini sangat membantu lah untuk beli beras, dan kebutuhan pokok walaupun tidak cukup untuk menyekolahkan anak. Paling utama memang untuk kebutuhan pokok.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara peneliti diatas bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dapat juga ada yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok, tetapi juga ada yang cukupi biaya kebutuhan pendidikan anak yang mana kepala keluarga hanya sebagai pekerja buruh untuk memenuhi kebutuhan.

#### 4. Jaminan Keuangan Keluarga

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

Tabungan keluarga Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Tabungan keluarga mencakup finansial rumah tangga, antara lain kepemilikan

---

<sup>65</sup> Miskun, Wawancara, 28 April 2023.

tabungan dan jenis tabungan. Tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompokkan dalam 3 jenis:

- a. Produk bank (tabungan/asuransi/deposito/giro)
- b. Produk non-bank (koperasi/kantor pos/sekolah)
- c. Produk lainnya (tabungan di lemari/dompet/celengan/dan sebagainya)

Mempertahankan ekonomi keluarga salah satunya adalah memiliki tabungan keluarga sebagai simpanan kelak. Dalam hal penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) peneliti menemukan bahwa dana yang diberikan untuk membeli anting dan cincin dengan alasan untuk simpanan mendatang. Kebutuhan pokok memang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi selain kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain jika bisa dan mampu maka penuhilah, karena untuk memperindah diri dan keluarga. Bu Bibit seorang salah satu penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) menuturkan kalimat tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan lainnya.

Berikut petikan wawancaranya:

Awal masa pandemi suami saya dipecat dari kerjanya di pabrik karena ada pengurangan karyawan, untuk membeli sembako dan membiayai anak sekolah saya tidak punya uang, sedangkan saya tidak bekerja. Ada di tahap terakhir, suami saya sudah mendapatkan kerja lagi, dan saya masih terdaftar sebagai KPM BLT dan uang tersebut saya gunakan dan diizinkan oleh suami untuk membeli anting dan cincin untuk simpanan selanjutnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Bibit, Wawancara, 3 Mei 2023.

Dari uraian wawancara di atas, informan memberitahukan bahwa kebutuhan pokoknya telah terpenuhi di karenakan kepala keluarganya yang telah bekerja lagi, dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dibelikan emas tujuannya yaitu untuk simpanan kelak jikalau ada kebutuhan yang darurat. Informan menandakan menjaga hartanya agar tidak habis begitu saja.

#### 5. Jaminan Kesehatan

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi adalah, kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini tidak ditemukannya kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap jaminan kesehatan keluarga seperti asuransi kesehatan. Tetapi ada beberapa informan atau penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini menggunakan dananya untuk berobat. Karena sudah tidak bekerja lagi mereka hanya berharap kepada bantuan ini untuk biaya berobat demi kesehatannya. Seperti Bu Kati (Mbah Kati), lansia yang juga mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari desa. Mereka sangat beryukur dengan adanya dana bantuan ini, dengan adanya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ia bisa berobat. Seperti saat diwawancarai:

Saya ini tidak punya kebun, rumah papan sederhana gini, ya kalau untuk kebutuhan saya cari uang dari kerja di kebun orang. Juga saya sekarang sering sakit jadi harus selalu

kontrol, kontrol juga butuh biaya. Ya Alhamdulillah keluarga saya dapat dana BLT ya digunakan buat biaya berobat, kontrol gitu. Karena memang sudah tidak ada lagi pendapatan.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara informan yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu ketahanan ekonomi keluarga yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) mereka lebih banyak digunakan untuk pendapatan keluarga yang melihat dari segi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan pada pembiayaan pendidikan anak dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebagian dari mereka untuk membiayai sekolah anak.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Karangpatihan yang sangat membutuhkan. Karena program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah disalurkan ke masyarakat desa melalui pemerintah desa dan dilaksanakan dengan baik. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah pusat,

---

<sup>67</sup> Kati, Wawancara, 3 Mei 2023.

daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat disposisi atau sikap dari pelaksana program bantuan sosial. Berikut hasil Wawancara peneliti terhadap Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan: Tentu saja masyarakat senang dengan adanya bantuan langsung tunai ini dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa dibantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan membeli bahan makanan ataupun keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara lain yang dikemukakan Ibu Sipon selaku KPM: “Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dari desa sangat membantu, selain membantu kebutuhan sehari-hari. Saya juga bisa memanfaatkan sebagian uangnya untuk berjualan. Alhmdulillah sekarang ada masukan walupun tidak seberapa<sup>68</sup>”

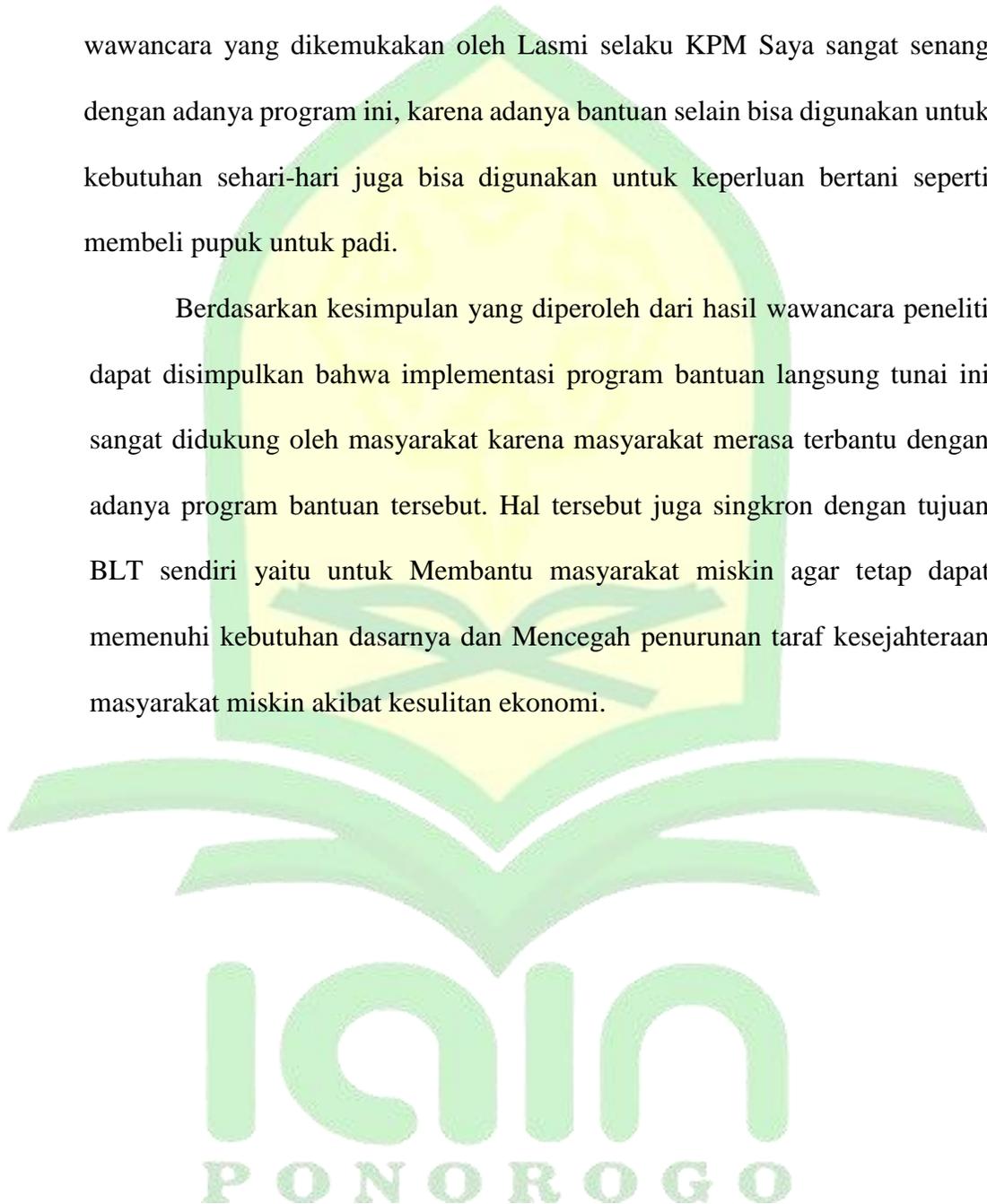
Pada program penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) dari dana

---

<sup>68</sup> Sipon, Wawancara, April 2023

desa belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga pelaku KPM juga harus mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Lasmi selaku KPM Saya sangat senang dengan adanya program ini, karena adanya bantuan selain bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga bisa digunakan untuk keperluan bertani seperti membeli pupuk untuk padi.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai ini sangat didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya program bantuan tersebut. Hal tersebut juga sinkron dengan tujuan BLT sendiri yaitu untuk Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.



## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG

#### A. Analisis Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Wahab implementasi kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statement* saja. Akan tetapi keberhasilan dinilai setelah *policy statement* tersebut diimplementasikan meskipun suatu *policy statement* sangat idel, akan tetapi dapat juga gagal mencapai tujuannya karena

kesalahan dalam implementasi. Terkait dengan kebijakan, paling tidak empat elemen untuk dicermati yakni: siapa pelaksana kebijakan, hakekat dari proses administratif, kepatuhan pada kebijakan dan dampak dari proses implementasinya. Keempat tahapan tersebut tentu saja berkaitan dengan aktor yang terlibat atau bersinggungan dengan proses implementasi kebijakan tersebut baik itu sebagai implementornya maupun elemen masyarakat yang menjadi objek kebijakan.

Dari hasil analisis penelitian Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong menguraikan bahwa implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sesuai dengan SOP, selain itu Implementasi ketahanan keluarga di desa Karangpatihan sudah cukup terbantu yang tadinya tidak bisa memenuhi kebutuhan menjadi bisa memenuhi kebutuhan pokok, dan ditambah ada yang mempergunakan uang untuk modal berjualan, dan sudah tepat sasaran.

Dalam perspektif Islam, ketahanan ekonomi keluarga dilihat dari indikator fakir, miskin, dan gharimin. Penelitian ini mendapatkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 hampir secara keseluruhan diberikan kepada kalangan atau orang fakir yaitu mereka yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dan sebagian juga ada mereka masuk dalam kalangan gharimin yaitu yang mempunyai hutang dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut sebagian untuk membayar hutang yang mana hutang tersebut adalah hutang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Penyaluran

dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini ditemukannya 34 untuk orang miskin yang disebutkan dalam konteks Islam yaitu mereka yang tidak mempunyai apa-apa yang secara umum kondisinya lebih buruk dari fakir. Dengan berlandaskan asas adil dan merata dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai tepat pada sasaran yaitu keluarga yang membutuhkan, dan belum menerima bantuan lain selain Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pandangan ekonomi Islam, menurut al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan al-dharuriyah (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan al-hajiyah (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan at-tahsiniyah (bersifat penyempurna). Dalam penelitian keluarga di desa Karangpatihan dilihat dari ekonomi Islam mereka memanfaatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 lebih diutamakan untuk kebutuhan al-dharuriyah yaitu kebutuhan yang bersifat pokok dan mendasar seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar yaitu al-nafs, yaitu kebutuhan diri dan jiwa. Selain untuk kebutuhan pokok masyarakat atau informan juga untuk memenuhi kebutuhan yang harus dijaga seperti melahirkan anak, dan keturunan yang mereka biayai untuk sekolah anaknya agar akal dan intelektualnya terjaga. Kedua, kebutuhan al-hajiyah yang bersifat kebutuhan sebagai pelengkap. Beberapa keluarga di desa Karangpatihan memanfaatkan dana BLT tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pokok, sebagian dari mereka yang memiliki usaha dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal dan akan terus berputar uang tersebut dan untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, kebutuhan at-tahsiniyyah merupakan kebutuhan yang bersifat memperlancar kebutuhan al-dharuriyyah dan al-hajiyyah. ada keluarga yang menggunakan dana ini untuk kebutuhan at-tahsiniyyah yang mana keluarga tersebut kebutuhan pokoknya telah terpenuhi karena kepala keluarganya yang telah bekerja lagi.

### **B. Analisis dampak Bantuan Sosial BLT untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Karangpatihan**

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi dan kemampuan yang memungkinkan keluarga untuk pulih dan bangkit dari sumber masalah dalam aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bagaimana keluarga mampu bertahan dari masalah keterpurukan dalam bidang ekonomi, namun juga tentang bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menurut Bank of International Settlements (BIS) merupakan kemampuan keluarga dalam bidang ekonomi untuk cepat pulih dari guncangan dan masalah yang merugikan dan mengandung dampak ketidak seimbangan dalam keuangan.

Ketahanan ekonomi keluarga dapat terlihat jika suatu keluarga dapat memenuhi syarat berdasarkan indikator ketahanan ekonomi keluarga yang telah ditentukan. Indikator ketahanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi acuan bagi keluarga untuk dapat hidup layak, mandiri dan tahan terhadap ancaman serta krisis ekonomi. Indikator ketahanan keluarga menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat dimensi,

yaitu<sup>69</sup>:

- a. Ketersediaan tempat tinggal keluarga
- b. Memiliki pendapatan perkapita perbulan keluarga
- c. Pembiayaan pendidikan anak yang tercukupi
- d. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak
- e. Keberlangsungan pendidikan anak
- f. Memiliki jaminan keuangan keluarga
- g. Jaminan kesehatan keluarga

Dari hasil analisis penelitian IMPLEMENTASI BLT UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG menguraikan bahwa desa Karangpatihan belum sepenuhnya mampu dalam mempertahankan ekonomi apalagi jika dilihat sebelum adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih banyak KPM yang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pandangan ekonomi Islam, menurut al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan al-dharuriyah (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan al-hajiyyah (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan at-tahsiniyyah (bersifat penyempurna). Dalam penelitian keluarga di desa Karangpatihan dilihat dari ekonomi Islam mereka memanfaatkan dana

---

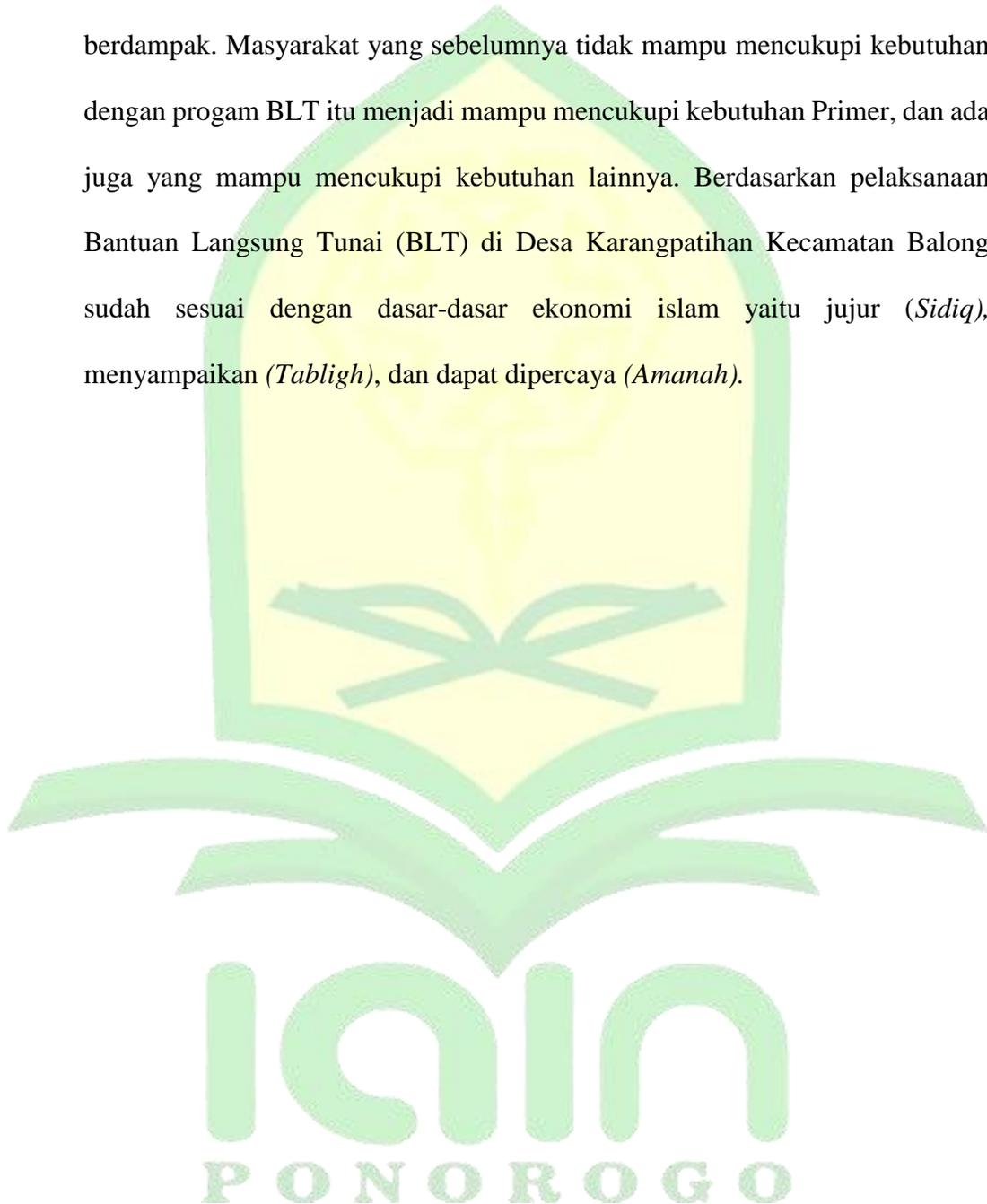
<sup>69</sup> Diana Nabillah Putri, "Implementasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)", *Sekripsi* (Lampung: UIN Raden Saleh, 2022), h. 35

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 lebih diutamakan untuk kebutuhan al-dharuriyah yaitu kebutuhan yang bersifat pokok dan mendasar seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar yaitu al-nafs, yaitu kebutuhan diri dan jiwa. Selain untuk kebutuhan pokok masyarakat atau informan juga untuk memenuhi kebutuhan yang harus dijaga seperti melahirkan anak, dan keturunan yang mereka biayai untuk sekolah anaknya agar akal dan intelektualnya terjaga. Kedua, kebutuhan al-hajiyah yang bersifat kebutuhan sebagai pelengkap. Beberapa keluarga di desa Karangpatihan memanfaatkan dana BLT tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pokok, sebagian dari mereka yang memiliki usaha dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal dan akan terus berputar uang tersebut dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, kebutuhan at-tahsiniah merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah kebutuhan al-dharuriyah dan al-hajiyah. ada keluarga yang menggunakan dana ini untuk kebutuhan at-tahsiniah yang mana keluarga tersebut kebutuhan pokoknya telah terpenuhi karena kepala keluarganya yang telah bekerja lagi.

Dengan demikian, harapan pemerintah adanya program BLT dapat berkontribusi untuk:

- a. Membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dari hasil analisis penelitian dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Katahanan Keluarga Desa Karangpatihan sangat berdampak. Masyarakat yang sebelumnya tidak mampu mencukupi kebutuhan dengan progam BLT itu menjadi mampu mencukupi kebutuhan Primer, dan ada juga yang mampu mencukupi kebutuhan lainnya. Berdasarkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sudah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi islam yaitu jujur (*Sidiq*), menyampaikan (*Tabligh*), dan dapat dipercaya (*Amanah*).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Dalam Prespektif Islam maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong menguraikan bahwa Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sesuai dengan SOP, selain itu Implementasi ketahanan keluarga di desa Karangpatihan sudah cukup terbantu yang tadinya tidak bisa memenuhi kebutuhan menjadi bisa memenuhi kebutuhan pokok, dan ditambah ada yang mempergunakan uang untuk modal berjualan. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sudah menggunakan asas adil dan merata, hanya saja masih ada beberapa KPM yang belum tepat sasaran ditambah lagi masih belum meratanya dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk membantu masyarakat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong.
2. Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Katahanan Keluarga Desa Karangpatihan sangat berdampak. Masyarakat yang sebelumnya tidak mampu mencukupi kebutuhan dengan progam BLT itu

menjadi mampu mencukupi kebutuhan Primer, dan ada juga yang mampu mencukupi kebutuhan lainnya. Berdasarkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sudah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi islam yaitu jujur (*Sidiq*), menyampaikan (*Tabligh*), dan dapat dipercaya (*Amanah*).

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sudah terlaksana dengan baik, penyaluran dan untuk kedepannya jika masih ada dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka lebih divalidkan lagi untuk penetapan warga penerima bantuan yaitu di dalam proses verifikasi dan validasi dan pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat.
2. Untuk keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) alangkah lebih baiknya dana digunakan untuk tetap menjaga perekonomian keluarga dan tetap dalam arahan pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol. 01 No. 01 (2018): 54–65.
- Aprilia, Yolla. "Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Aulia, Meilana. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur." *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022.
- Badan Statistik, Badan. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Baharuddin. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 202." *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2020.
- Bibit, Wawancara.
- Boiman, Wawancara.
- Al-Quran dan Terjemahannya Bandung : CV Diponegoro, 2005," t.t., 150.  
Fatimah, Siti. Wawancara.
- Fitrianna, Nurma. "Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Khusus Lazismu KL BMT Hasanah Ponorogo)." *Journal Of Islamic Philantrophy and Disaster (JOIPAD)* 01 No.01 (2021): 55–70.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (5 Januari 2017): 21–46.
- Kasanah, Nur. "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah Di UPIZ NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." *Journal of Islamic Philantrophy and Disaster* 01 No. 01 (2021): 71.
- Kati, Wawancara

- . Wawancara,
- Katinah, Wawancara,
- , Wawancara,
- Katiyem, Wawancara,
- Kuncoro, Sugeng. Wawancara,
- Lutfi, Mohammad. “PERBANKAN SYARI’AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” 1 (2019).
- . “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim.” *Jurnal Syar’e* Vol.3 No 2 (2020): 186–97.
- Miskun, Wawancara
- Muji, Wawancara
- Mulyadi, Eko. Wawancara, 3 April 2023.
- Mustari, Nuryanti. *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 1 ed. PT Leutikaprio, 2015.
- Nafida, Arumdani. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.” *Mei 2021* Vol. 2 No.5 (t.t.): 875.
- Nizar Hidayat, Andi Rahmat. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar*, 2021.
- Nurahmawati, Fika. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak.” *2020* Vol. 4, no. 2 (t.t.): 166. <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>.
- P3EI-FE UII, DEKS Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016.

- Pasila, Nining. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Pada Tahun 2021 Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.” *Skripsi, Muhammadiyah Makasar*, 2022.
- Pusat Statistik, Badan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Riyadh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Putri, Diana Nabillah. “Analisis Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid -19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi.” *Sekripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022, 24.
- . “(Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).” *UIN Raden Saleh Lampung*, 2022.
- Rahman, Abu. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015.
- Riadi, Sarip. Wawancara
- Rosidi, Imron. “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwagi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid-19 K.” *Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022, 82.
- Saimun, Wawancara
- Sanusi, Anwar. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai– Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*. KOMPAK, 2020.
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA,” no. 108
- Setiawan, Joko, Wawancara
- Sipon, Wawancara
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta, 2014.

“Surat Al-Ma’idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”  
Diakses 3 Mei 2023. <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.

Sururoh, Insiya Meilin. “JURUSAN EKONOMI SYARI’AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2021, 121.

Syafawi, Izhar, dan Moh Nazar Fajri. “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021”, *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 6, No. 2, (2021), h. 17–26.” *Jurnal SIKAP*,

“Terkait Besaran dan Kriteria Penerima BLT-DD Tahun 2023, Ini Penjelasan Kepala DPMD Banyuasin | BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN,” 3 April 2023. <https://sumsel.bpk.go.id/2023/02/20/terkait-besaran-dan-kriteria-penerima-blt-dd-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-dpmd-banyuasin/>.

Tsania, Nur Fitri. “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng.” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2022, 88.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.” 2014.

Wagiyem, Wawancara

Wati, Dessy Laras. “PROGRAM S1 JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1442 H/2021 M.” *UIN Sultan Syarif Kasim*, 2021, 82.

Zuhriyah, Wawancara



